



Dari Hafal Menjadi Paham: Upaya Transformasi PPKN untuk Generasi Berkarakter dan Kritis

¹Sri Yunita, ²Hotmauli M Marpaung, ³Best Maridup P Silaban

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author:

Sri Yunita

sriyunita@unimed.ac.id

Abstract

This research analyzes the transformation of Pancasila and Civics Education (PPKn) from a memorization paradigm towards character strengthening and critical reasoning. Previously, PPKn learning in schools tended to be trapped in a cognitive-theoretical approach that emphasized rote mastery of material, hindering the formation of holistic citizens and critical thinking skills. This study aims to analyze the implementation of PPKn learning transformation in character strengthening and critical reasoning development, as well as identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through social media content analysis and documentation. The results indicate the urgency of shifting the paradigm from memorization towards character strengthening and critical reasoning, consistent with relevant findings from Amri et al. (2024) and Mukmin & Sihalo (2024) who criticized the dominance of the cognitive-theoretical approach. This transformation demands fundamental changes in teaching methodology, shifting from knowledge transfer to experience, analysis, and active student participation. For character strengthening, it is important to create authentic and participatory learning experiences where students can directly apply and internalize civic values, rather than merely memorizing them. Meanwhile, the development of critical reasoning requires strategies that encourage students to analyze, evaluate, and deeply understand socio-political dynamics. In conclusion, the essence of this transformation is the shift of students from passive recipients to active learners who think critically, reason, and possess strong character, forming the foundation for meaningful civic participation.

Keywords: Character, Critical Reasoning, Learning Transformation, Memorization, PPKN

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari paradigma hafalan menuju penguatan karakter dan pengembangan nalar. Selama ini, pembelajaran PPKn di sekolah cenderung terjebak pada pendekatan kognitif-teoritis yang menekankan penguasaan materi secara hafalan, yang menghambat pembentukan warga negara yang holistik dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi pembelajaran PPKn dalam penguatan karakter dan pengembangan nalar kritis, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui analisis konten media sosial dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pergeseran paradigma dari hafalan menuju penguatan karakter dan nalar kritis, sejalan dengan temuan relevan dari Amri dkk. (2024) dan Mukmin & Sihalo (2024) yang mengkritik dominasi pendekatan kognitif-teoritis. Transformasi ini menuntut perubahan mendasar dalam metodologi pengajaran, beralih dari transfer pengetahuan ke pengalaman, analisis, dan partisipasi aktif siswa. Untuk penguatan karakter, penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang otentik dan partisipatif agar siswa dapat menerapkan dan menghayati nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung. Sementara itu, pengembangan nalar kritis membutuhkan strategi yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami dinamika sosial-politik secara mendalam. Kesimpulannya, inti transformasi ini adalah peralihan siswa dari penerima pasif menjadi pembelajar aktif yang berpikir kritis, bernalar, dan berkarakter kuat, sebagai fondasi partisipasi kewarganegaraan yang bermakna.

Kata Kunci: Hafalan, Karakter, Nalar Kritis, PPKN, Transformasi Pembelajaran.

Pendahuluan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau yang sebelumnya dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi warga negara yang demokratis dan partisipatif. Seperti yang diungkapkan oleh (Akmin, 2024). Tujuan utama mata pelajaran ini adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung

Lingkar Publikasi Indonesia

Copyright © 2025



jawab. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PPKn di sekolah seringkali masih terfokus pada aspek pengetahuan semata dan kurang menekankan pada pengembangan karakter serta keterampilan kewarganegaraan yang esensial dalam kehidupan nyata. Selama ini, implementasi PPKn di sekolah cenderung terjebak pada paradigma lama yang bersifat indoktrinatif dan menekankan pada penguasaan materi secara hafalan. (Mukmin, Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif, 2024) mengemukakan bahwa dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan belum memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi saat ini membentuk karakter warga negara. Kondisi ini mengakibatkan PPKn belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai dasar negara dalam diri peserta didik agar menjadi warga negara yang cinta tanah air, berintegritas, dan menjunjung tinggi toleransi. Dalam praktiknya, Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, pendidikan karakter menjadi fokus utama di sekolah, termasuk di jenjang sekolah dasar. Namun implementasi pendidikan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila masih menghadapi banyak tantangan, seperti minimnya pemahaman siswa dan variasi pendekatan di masing-masing sekolah. (Nadia, p. 2021).

Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki sikap, pemahaman, dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pendidikan karakter merupakan bagian dari proses tersebut yang menekankan pada pembentukan nilai moral dan kepribadian peserta didik dalam kehidupan social. Di era modern, kemerosotan moral seperti meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, dan kurangnya sopan santun menjadi perhatian utama. Pemerintah melalui Kurikulum 2013 telah menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan awal memiliki peran krusial dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada anak usia dini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berkualitas. (Mukmin, 2024) menegaskan bahwa PPKn memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sebagai fondasi pembentukan karakter dan jati diri bangsa, PPKn tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan semata, melainkan juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma kewarganegaraan. Namun lebih dalam lagi, pendidikan Pancasila yang efektif harus mampu membentuk habitus moral siswa melalui keteladanan guru, penanaman nilai lintas mata pelajaran, serta penguatan melalui pengawasan sosial dari komunitas sekolah dan keluarga. Transformasi pendidikan Pancasila tidak cukup hanya berada di ruang kelas, melainkan harus menjadi budaya sekolah yang hidup, membentuk siswa yang tidak hanya tahu apa itu nilai Pancasila, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam bersikap dan bertindak.

Secara historis, pembelajaran PPKn seringkali dihadapkan pada tantangan dominasi pendekatan kognitif-teoritis yang berorientasi pada hafalan (Mukmin & Sihalo, 2024; Amri et al., 2024). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang berkualitas. PPKn memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sebagai fondasi pembentukan karakter dan jati diri bangsa, PPKn tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan semata, melainkan juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma kewarganegaraan. nilai-nilai

Pancasila dan norma kewarganegaraan dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Implementasinya tidak lagi didominasi oleh metode ceramah atau pemberian tugas hafalan, melainkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Guru PPKn berupaya mendesain pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan nilai-nilai karakter. Misalnya, melalui proyek-proyek berbasis karakter yang menuntut peserta didik untuk berkolaborasi, menunjukkan empati, atau mengambil tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Contoh konkretnya bisa berupa kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana, partisipasi aktif dalam kebersihan lingkungan sekolah, atau inisiatif untuk membantu teman yang kesulitan belajar.

Transformasi pendidikan merujuk pada sebuah proses perubahan mendalam dan menyeluruh dalam sistem pendidikan, yang tidak hanya menyentuh aspek-aspek superfisial, melainkan juga filosofi, tujuan, struktur, kurikulum, metode pengajaran, penilaian, hingga budaya belajar mengajar itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, adaptif, inklusif, dan mampu mempersiapkan individu menghadapi tantangan masa depan yang terus berubah. (Aini, 2020). Transformasi pembelajaran menuju penguatan karakter merupakan upaya sistematis untuk menggeser fokus dari sekadar mengingat fakta dan konsep ke arah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma kewarganegaraan.

Pengembangan Nalar Kritis merupakan pergeseran dari paradigma hafalan ke pengembangan nalar kritis, upaya untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir analitis, logis, dan evaluatif terhadap isu-isu kewarganegaraan. Implementasi ini menuntut perubahan signifikan dalam strategi pengajaran guru. Guru PPKn kini lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang mendorong debat dan diskusi analitis. Topik-topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau isu-isu publik yang hangat (namun sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka) diangkat untuk diperdebatkan atau didiskusikan secara mendalam. Hal ini melatih peserta didik untuk menyusun argumen yang kuat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mempertahankan pendapat mereka secara rasional. Proses transformasi pembelajaran PPKn menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilannya. Faktor pendukung utama seringkali datang dari kepemimpinan sekolah yang visioner, terutama dari kepala sekolah yang memiliki pemahaman kuat tentang pentingnya penguatan karakter dan nalar kritis, serta memberikan dukungan penuh bagi guru untuk berinovasi. Komitmen dan motivasi guru PPKn juga menjadi pilar penting.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran dan juga dari proses supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Penanaman nilai karakter seperti religius, jujur, tanggung jawab, dan peduli sosial menjadi sangat krusial di tengah meningkatnya berbagai kasus degradasi moral seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. Secara lebih dalam, guru bukan hanya bertugas sebagai fasilitator materi pelajaran, melainkan juga berfungsi sebagai model nyata yang mencerminkan nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Supervisi pendidikan yang baik berperan memastikan bahwa implementasi pendidikan karakter berjalan dengan efektif, melalui observasi, bimbingan, dan umpan balik yang membangun. Dalam konteks ini, pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mengembangkan aspek kognitif siswa, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik, misalnya dengan mengaitkan nilai karakter dalam tema pelajaran, proyek sosial, dan kegiatan reflektif. Maka, penanaman karakter yang kuat memerlukan sinergi antara pendidik, manajemen sekolah, kurikulum, serta partisipasi orang tua, agar

pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa cerdas, tetapi juga berkepribadian unggul dalam masyarakat. (ernarisa, p. 2020)

Penguatan pendidikan karakter adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik agar menjadi manusia berakhlak dan berintegritas. Proses ini mencakup keteladanan, pembelajaran, dan pembudayaan nilai di lingkungan sekolah.

Tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan karakter adalah arus globalisasi yang membawa dampak negatif, seperti kekerasan, penyimpangan sosial, dan lunturnya norma agama serta budaya. (Meli, p. 2020) Dalam konteks ini, sekolah memiliki peran penting sebagai wadah internalisasi karakter. Dalam pelaksanaannya di sekolah, implementasi penguatan pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai model: model otonomi (pembelajaran langsung nilai karakter), model integrasi (menggabungkan nilai karakter dalam semua mata pelajaran), model ekstrakurikuler (penguatan karakter di luar kelas), dan model kolaboratif (melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara menyeluruh). Tambahan yang lebih penting adalah bahwa pendidikan karakter tidak hanya bersifat normatif, tetapi perlu dibangun dalam iklim sekolah yang mendukung, seperti budaya sekolah yang positif, keteladanan guru, serta penghargaan terhadap perilaku baik siswa. Guru harus memahami bahwa nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian tidak bisa diajarkan secara verbal semata, tetapi harus dikonkretkan melalui pembiasaan, refleksi tindakan, dan lingkungan yang konsisten. Oleh karena itu, pendidikan karakter bukan sekadar program tambahan, melainkan harus menjadi napas utama dalam setiap aktivitas pendidikan di sekolah.

Profil Pelajar Pancasila adalah representasi ideal pelajar Indonesia yang beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebhinekaan global. Nilai-nilai tersebut menjadi arah pembangunan karakter dalam Kurikulum Merdeka. (muhammad, p. 2024)

Namun dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan lokal sangat dibutuhkan agar nilai-nilai nasional lebih mudah diinternalisasi. Artikel ini membahas pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan karakter pelajar agar relevan dengan kehidupan sehari-hari dan memperkuat identitas bangsa. Pendidikan yang menyatu dengan budaya daerah seperti adat istiadat, bahasa lokal, dan nilai etika setempat dinilai mampu membentuk generasi berkarakter kuat dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini bersumber dari Pancasila dan menjadi kerangka utama dalam pembentukan karakter di era Kurikulum Merdeka. Namun demikian, nilai-nilai luhur tersebut akan lebih bermakna dan mudah diinternalisasi apabila dikontekstualisasikan dengan budaya lokal atau kearifan lokal tempat peserta didik tinggal. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kearifan lokal seperti tradisi gotong royong, adat istiadat daerah, bahasa lokal, serta praktik sosial masyarakat sekitar. Integrasi ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, dan kepedulian sosial yang berbasis pada nilai keseharian. Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal harus dilakukan secara sistematis, baik melalui pembelajaran di kelas, kegiatan proyek, maupun dalam interaksi sosial siswa sehari-hari.

Pada tantangan abad ke-21 yang menuntut generasi muda memiliki kecakapan teknologi dan literasi digital, tetapi juga menuntut adanya ketahanan karakter dan sikap kebangsaan yang kuat. Peran guru PPKn menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena mereka

memiliki fungsi ganda: sebagai pengajar pengetahuan kewarganegaraan dan sebagai agen pembentuk karakter warga negara. Guru PPKn harus mampu memadukan materi formal dengan pendekatan kontekstual dan reflektif untuk menghidupkan nilai-nilai seperti demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan cinta tanah air di tengah derasnya arus informasi dan ideologi transnasional. (sugara, p. 2020).

Kemudian masuk pada Politik pendidikan yang dimana dimensi penting dalam pembangunan nasional karena melalui pendidikanlah arah masa depan bangsa dibentuk. Pasca reformasi 1998, sistem pendidikan Indonesia mengalami pergeseran dari sentralistik ke desentralistik, yang ditandai dengan munculnya otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan sering kali menciptakan ketimpangan baru, terutama dalam hal kualitas guru, anggaran, dan fasilitas antar daerah. Lebih dalam lagi, politik pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan elit, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan pendidikan kerap menjadi arena kontestasi ideologi dan kekuasaan, seperti terlihat dalam perubahan kurikulum, polemik full day school, hingga komersialisasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap arah kebijakan pendidikan pasca reformasi agar tetap berpihak pada pemerataan, mutu, dan keadilan pendidikan nasional. (Hastangka, 2018). politik pendidikan Indonesia tidak lepas dari problem struktural seperti tumpang tindih regulasi, intervensi politik lokal, dan belum meratanya kapasitas pengelolaan di tingkat daerah. Di satu sisi, otonomi daerah membuka ruang bagi inovasi dan kebijakan berbasis lokal. Di sisi lain, hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas antarwilayah karena perbedaan sumber daya dan komitmen pemda. Selain itu, munculnya aktor non-negara seperti LSM, sektor swasta, dan bahkan lembaga donor internasional semakin memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional, baik dalam bentuk program bantuan, kurikulum global, hingga standarisasi mutu pendidikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral dari politik, karena setiap kebijakan yang diambil mencerminkan visi pembangunan bangsa ke depan. Oleh sebab itu, kajian politik pendidikan perlu memperhatikan aspek keadilan sosial, akses yang merata, serta perlindungan terhadap nilai-nilai pendidikan nasional agar arah reformasi tidak melenceng dari semangat konstitusi.

Konsep pendidikan kewarganegaraan tidak harus terbatas di ruang kelas, tetapi juga dapat diaktualisasikan melalui kegiatan sosial dan kepemudaan yang mendorong partisipasi aktif, kepedulian sosial, dan tanggung jawab warga negara. Revitalisasi Karang Taruna berarti mengubahnya dari organisasi seremonial menjadi komunitas politik akar rumput yang membentuk kesadaran demokrasi. Di tengah tantangan apatisme politik generasi muda dan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana politik yang dangkal, Karang Taruna dapat menjadi tempat pelatihan demokrasi yang nyata—melalui musyawarah, pelatihan kepemimpinan, pengelolaan kegiatan publik, dan advokasi sosial. Dengan pendekatan yang sistematis dan dukungan pemerintah desa, Karang Taruna dapat menjadi benteng ideologis bangsa dan motor penggerak perubahan sosial di tingkat lokal. Sebagai komunitas sosial berbasis pemuda, Karang Taruna memiliki potensi besar menjadi ruang pembelajaran demokrasi partisipatif, pengembangan kepemimpinan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tingkat akar rumput. Namun kenyataannya, peran Karang Taruna sering kali tereduksi hanya sebagai penyelenggara kegiatan seremonial atau hiburan, bukan sebagai medium pendidikan sosial-politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi diperlukan agar Karang Taruna mampu menjalankan fungsi pedagogis secara kontekstual, yaitu sebagai tempat pelatihan pengambilan keputusan kolektif, diskusi publik, advokasi kebijakan lokal, serta pendampingan sosial masyarakat rentan. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan seperti apatisme pemuda, radikalisme digital, dan krisis identitas kewargaan, Karang Taruna bisa menjadi agen kontra-arus melalui penguatan nilai toleransi, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air. Upaya revitalisasi ini membutuhkan

sinergi antara pemerintah desa, sekolah, serta tokoh masyarakat agar Karang Taruna dapat menjadi wahana pendidikan kewarganegaraan yang hidup dan berdampak nyata bagi komunitas lokal. (Rahmadani Fahdian, 2018).

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau individu. (Cresswell, 2014). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik populasi atau area studi tertentu. Dalam konteks mini riset ini, metode deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci implementasi transformasi pembelajaran PPKn dari paradigma hafalan menuju penguatan karakter dan pengembangan nalar kritis. Data primer diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal akademik, artikel media massa, dan dokumentasi hukum yang relevan dengan Transformasi kewarganegaraan yang membahas bagaimana implementasi PPKN saat ini. Data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan data dari komentar dan opini masyarakat di media sosial mengenai isu PPKN yang hanya dijadikan sebagai hafalan tanpa menjadikannya sebagai ilmu yang analitis. Penelitian dilakukan secara daring melalui pengamatan media sosial (seperti Instagram, TikTok, website dan Facebook) yang mencakup konten, komentar, dan diskusi publik mengenai pembelajaran PPKN yang dianggap hanya sebagai hafalan tanpa tujuan sebenarnya.

Hasil

Berdasarkan Study analisis yang didapat dari sumber jurnal: 1. Aini (2020) pada jurnal pandawan tentang “transformasi Pendidikan digital 5.0 melalui integrasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi”. 2. Akmin, S (2024) pada jurnal Gentala Pendidikan dasar tentang “transformasi paradigma PKN menuju pengembangan karakter yang demokratis dan partisipatif di sekolah dasar”. Dan buku yang berjudul “Prosiding: Revitalisasi peran karang taruna sebagai wahana Pendidikan kewarganegaraan” oleh Rahmadani Fahdian pada 2024 serta berita dari artikel website “Tantangan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar (2024) yang diambil dari berita Kompasiana, ditemukan bahwa pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila masih menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, terutama di jenjang pendidikan dasar. Implementasinya dilakukan melalui pembelajaran tematik, pembiasaan sikap, integrasi nilai dalam mata pelajaran, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Guru, khususnya guru PPKn, memainkan peran strategis dalam pembentukan kepribadian dan kesadaran kebangsaan siswa, terlebih di tengah tantangan globalisasi dan era digital. Di sisi lain, politik pendidikan pasca reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan desentralisasi sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pemerataan dan mutu pendidikan. Selain itu, komunitas lokal seperti Karang Taruna juga memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan non-formal yang partisipatif dan membina. Guru PPKn perlu mengadopsi metode pembelajaran yang tidak sekadar transfer pengetahuan, melainkan yang memfasilitasi interaksi langsung siswa dengan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti melalui proyek-proyek kolaboratif, studi kasus, atau diskusi yang mendorong partisipasi aktif dan pengalaman nyata dalam konteks sosial. Secara eksplisit pendekatan “berpikir politis” sebagai fondasi PKN transformatif, yang dioperasionalkan melalui model *living citizenship*. Ini menyiratkan bahwa pembelajaran PPKn harus dirancang untuk tidak hanya mengenalkan

konsep politik, tetapi juga untuk membantu siswa menganalisis realitas politik sehari-hari, memahami hak dan kewajiban secara fungsional, dan mengembangkan kapasitas penalaran mereka. Strategi ini mungkin mencakup penggunaan berita kontemporer sebagai bahan diskusi, simulasi permasalahan sosial-politik, atau mendorong siswa untuk merumuskan argumen mereka sendiri tentang isu-isu kewarganegaraan. Jadi intinya pkn tidak hanya dengan dihafalkan saja melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap peserta didik dalam bentuk perbuatan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan untuk dihapal melainkan untuk dipraktekkan dalam kehidupan nyata. (Pratomo, 2023) Sehingga ini menunjukkan bahwa transformasi ini membutuhkan perubahan mendasar dalam metodologi pengajaran yang berfokus pada pengalaman, analisis, dan partisipasi aktif siswa, bukan lagi pada reproduksi informasi melalui hafalan.

Pembahasan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan identitas bangsa, namun pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan kolaboratif. Meskipun sudah banyak sekolah yang menerapkan program penguatan pendidikan karakter, tantangan masih muncul dalam bentuk lemahnya keteladanan, kurangnya pelatihan guru, dan belum optimalnya dukungan kebijakan daerah. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, guru perlu mengembangkan metode reflektif dan kontekstual agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Di luar sekolah, komunitas seperti Karang Taruna dapat berfungsi sebagai ruang belajar demokrasi yang hidup, namun membutuhkan revitalisasi kelembagaan dan dukungan kebijakan desa. Politik pendidikan pasca reformasi menuntut arah kebijakan yang menjamin keadilan, pemerataan, dan perlindungan nilai-nilai dasar negara agar pendidikan tidak sekadar mengejar mutu akademik, tetapi juga mencetak warga negara yang ber karakter, kritis, dan peduli terhadap kehidupan sosial. Transformasi pembelajaran PPKn Hafalan, meskipun memiliki tempat dalam mengingat fakta dasar, terbukti tidak memadai untuk membentuk warga negara yang mampu menghadapi kompleksitas sosial dan politik yang terus berkembang..

Implementasi penguatan PPKN memerlukan pergeseran dari pengajaran nilai-nilai secara kognitif-teoritis menjadi pembelajaran yang lebih partisipatif dan berorientasi praktik. Hal ini menyiratkan bahwa guru PPKn perlu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan yang secara langsung merefleksikan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti proyek kolaboratif yang menuntut tanggung jawab, atau diskusi yang memicu sikap toleransi dan empati. Proses ini, di mana siswa belajar untuk merasakan dan menerapkan nilai-nilai dalam interaksi nyata, akan memupuk karakter yang demokratis dan partisipatif. Tanpa pengalaman langsung ini, penguatan karakter akan tetap berada pada level pengetahuan saja, tanpa mampu termanifestasi dalam tindakan atau sikap.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian study analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Upaya Transformasi PPKN untuk Generasi Ber karakter dan Kritis merupakan pendidikan karakter berbasis Pancasila merupakan inti dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, dan perwujudannya membutuhkan peran aktif seluruh elemen pendidikan, mulai dari guru, sekolah, hingga komunitas masyarakat. Implementasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui kurikulum formal, pembiasaan sikap, hingga kegiatan

ekstrakurikuler yang berorientasi pada pembentukan pribadi dan warga negara yang baik. Guru PPKn secara khusus memegang peran strategis sebagai pendidik nilai dan fasilitator kesadaran kebangsaan di tengah tantangan global dan digitalisasi. Sementara itu, dinamika politik pendidikan pasca reformasi menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan memerlukan sinergi antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan mutu dan akses. Selain sekolah, komunitas lokal seperti Karang Taruna juga terbukti memiliki potensi besar dalam menumbuhkan partisipasi demokratis dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang kontekstual, demokratis, dan partisipatif menjadi jawaban terhadap tantangan pendidikan masa kini dan masa depan.

Referensi

- Aini. (2020). Transformasi Pendidikan Digital 5.0 melalui Integrasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *jurnal pandawan*, 50-62.
- Akmin, s. (2024). Transformasi Paradigma PKn Menuju Pengembangan Karakter yang Demokratis dan Partisipatif di Sekolah Dasar. . *jurnal gentala pendidkan dasar*, 22-29.
- Fahreza R,dkk. (2018). *Prosiding:Revitalisasi peran karang taruna sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan*.
- Ernarisa, f. (2020). penanaman nilai niali pendidikan karakter melalui peran pendidik dan supervisi pendidikan. *jurnal ilmiah akademik*.
- Hastangka. (2018). *Prosding:politik pendidikan indonesia pasca reformasi*. yogyakarta.
- Meli, y. (n.d.). implementasi penguatan pendidikan pendidikan karakter di sekolah.
- Muhammad, f. (2024). pengembangan pendidikan karakter dan profil pelajar pancasila berwawasan kearifan lokal. *jurnal edukasi*.
- Mukmin, S. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif. *jurnal transformative*, 22-30.
- Nadia, P. T. (2021). Analisis implementasi pendidikan pancasila sebagai pendidikan karakter. *jurnal edukasi*.
- Rahmadani Fahdian, d. (2018). *Prosiding:Revitalisasi Peran Karang Taruna sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan*.